

**ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI BUDIDAYA TERNAK JANGKRIK**

TUGAS AKHIR

Penerbitan Hak Cipta

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Dalam Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Pada Program Studi Ilmu
Pemerintahan



Oleh : MARIKUN

NIM: 21222036

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
TAHUN 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

HKI ini Disusun oleh : MARIKUN
NIM : 21222036
Judul : ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI BUDIDAYA
TERNAK JANGKRIK
Disahkan Pada : 24 Januari 2023

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Ponorogo, 24 Januari 2023

Pembimbing I



Drs. Bambang Triono, M.Si
NIDN 0709066403

Pembimbing II



Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP
NIDN. 0703058104

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI BUDIDAYA TERNAK
JANGKRIK

Disusun oleh : MARIKUN

NIM : 21222036

Telah dipertahankan di : 24 Januari 2023
depan penguji pada

Hari : Selasa

Ruang : Ruang Sidang B 102

Pukul : 09.00 – 10.30 WIB.

DEWAN PENGUJI

Penguji I

Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP
NIDN. 0703058104

Penguji II

Khoirurrosyidin, M.Si
NIDN. 0705057501

Penguji III

Drs. Bambang Triono, M.Si
NIDN. 0709066403

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik



Ayub Dwi Anggoro, Ph.D
NIK. 19860325 201309 12

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marikun

NIM : 21222036

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa HKI ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, dalam HKI ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 24 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Marikun

NIM. 21222036



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website :www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT (SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGGANTI TUGAS AKHIR MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A
NIK : 1986022820150912
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui bahwa publikasi ilmiah/kekayaan intelektual/PKM yang akan dilakukan dan/atau diajukan oleh :

Nama : Marikun
NIM : 21222036
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Judul : ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BUDIDAYA TERNAK JANGKRIK.

Adalah dijadikan sebagai pengganti tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat dengan sebenar - benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 24 Januari 2023

Pembimbing I

Drs. Bambang Triono, M.Si

Pembimbing II

Dr. Dian Sulth Kusuma Dewi, M.AP

Mengetahui
Ketua Program Studi



Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Ayah dan ibu tercinta ; Alm Gimana dan Siyem yang tanpa lelah sudah Mendukung semua keputusan dan pilihan hidup saya serta tidak pernah Putus mendoakan saya.

2. Istri tercinta Sulastris

3. Anakku Bintang Bayu Manggala Yudha

Yang ayah sayangi dan ayah banggakan.

Semoga Allah senantiasa selalu memberikan keberkahan dalam hidupnya.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Hanya kepada Allah SWT penulis mampu berdaya upaya dalam segala hal, tiada hal yang pantas diucapkan kecuali rasa syukur tiada terhingga atas limpahan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir HKI berupa Poster ini.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada pendidik sejati Rosululloh SAW yang telah memberi suri tauladan kepada seluruh ummat manusia.

Dalam rangka proses penyusunan HKI ini, bukan berjalan tanpa hambatan akan tetapi berkat motivasi, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, kesulitan maupun hambatan tersebut dapat terlewati sehingga HKI ini terselesaikan dengan baik. Maka dari itu izinkan penulis memberikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Happy Susanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Ayub Dwi Anggoro, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Dr. Jusuf Harsono, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa penyelesaian HKI ini.
4. Ibu, istri dan anakku tercinta Bintang Manggala atas semua do'anya danyang selalu menjadi penyemangat dalam penyusunan HKI ini.
5. Seluruh teman-teman mahasiswa se-angkatan dan se-perjuangan tahun 2021 di prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian HKI ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan pahala yang sepadan dan dicatat sebagai amal sholih kepada semua pihak tersebut atas segala bimbingan dan bantuannya.

Akhirul kalam, semoga dengan rahmat dan berkah-Nya HKI ini mendapat ridho Allah SWT dan bermanfaat bagi kita semuanya.

Ponorogo, 24 Januari 2023



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II	6
PEMBAHASAN	6
A. Definisi Konsep.....	6
B. Landasan Teori.....	7
C. Metode Penelitian.....	10
BAB III.....	12
DESKRIPSI.....	12
A. Deskripsi Poster Lengkap	12
B. Model.....	13
C. Hasil HKI.....	14
BAB IV	15
PENUTUP	15
A. KESIMPULAN.....	15
B. Kritik dan Saran.....	15
A.FOTO MUSYAWARAH DESA.....	17
B.FOTO/GAMBAR BUDIDAYA JANGKRIK.....	18

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai kekayaan terbanyak, namun memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran yang besar pula. Pada kuartal Triwulan III tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 5.58. Angka tersebut masih di bawah angka laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.72. padahal sepanjang tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi nasional berada kisaran -2.07, sementara laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar -2.33. sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2022 adalah 26,16 juta jiwa. Sedangkan tingkat kemiskinan Indonesia pada bulan yang sama sebesar 9,54 persen(BAPPENAS:2022).

Data tersebut semakin memvalidasi bahwa pandemi Covid-19 benar-benar telah berdampak luas bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Maka sangat wajar jika Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Implementasi RKP 2020 yang mengusung tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” sangat penting untuk capaian awal tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sejumlah target indikator makro ditetapkan untuk dicapai pada 2020, di antaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,51, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2–5,5 persen, tingkat kemiskinan 8,5–9,0 persen, Rasio Gini sebesar 0,375–0,380, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,8—5,1 persen(BAPPENAS:2022).

RKP 2020 dijabarkan dalam lima Prioritas Nasional (PN), yakni PN 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan dengan alokasi anggaran sebesar 157,1 triliun rupiah, PN 2: Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, dengan alokasi anggaran senilai 75,5 triliun rupiah, PN 3: Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja dengan alokasi anggaran sebesar 24,4 triliun rupiah, PN 4: Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup

dengan alokasi anggaran sebesar 43,7 triliun rupiah, dan PN 5: Stabilitas Pertahanan dan Keamanan dengan alokasi anggaran senilai 36,6 triliun rupiah. Total alokasi anggaran bagi kelima PN yang diamanatkan dalam RKP 2020 adalah sebesar 337,3 triliun rupiah. “Dari lima prioritas nasional tersebut, maka kita bisa lihat bahwa prioritas nasional dengan porsi anggaran terbesar mencapai 157,1 triliun rupiah adalah untuk Prioritas Nasional 1: Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan,” (BAPPENAS:2022).

Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan dilaksanakan melalui implementasi program prioritas perlindungan sosial kelompok rentan dan penduduk miskin, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/PBI) untuk 96,8 juta jiwa, bantuan pendidikan bagi siswa miskin atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 20,1 juta siswa, bantuan pendidikan bagi mahasiswa miskin melalui Bidik Misi dan KIP-Kuliah untuk 462 ribu mahasiswa, Bantuan Tunai Bersyarat (PKH) sebesar 10 juta keluarga dan Bantuan Pangan Non Tunai/Keluarga Sangat Miskin (BPNT/KSM) untuk 15,6 juta keluarga. Untuk penanganan stunting, disediakan makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis untuk 345 ribu ibu hamil dan makanan tambahan bagi balita kurus 602 ribu balita, serta penyediaan obat gizi seperti Vitamin A Merah, Vitamin A Biru, Tablet Penambah Darah Ibu Hamil. Di bidang pendidikan, pemerintah fokus untuk pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui rehabilitasi ruang kelas dari Sekolah Dasar hingga pendidikan tinggi.

Meskipun pada periode Maret-September 2021, penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur mencapai 313.130 jiwa. Kemudian, pada periode Maret 2021-Maret 2022, penurunan angka kemiskinan berhasil mencapai angka 391.400 jiwa (tertinggi nasional)(BPS Jatim:2022). Pemerintah Desa Ngabar sebagai sub sistem pemerintah yang menjadi ujung tombak pemerintah, terus melakukan upaya-upaya inovatif untuk memberdayakan masyarakat desa melalui kegiatan kewirausahaan. Salah satu program pemberdayaan masyarakat desa Ngabar yang unik adalah budidaya ternak jangkrik. Kebutuhan komoditas jangkrik sepanjang 3 tahun terakhir di kabupaten Ponorogo relatif tinggi seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki hobby memelihara burung kicau dengan berbagai variannya.

Merujuk pada Pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor

21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahwa pada tahun 2021 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ada beberapa inovasi kewirausahaan yang bersumber dari dana Desa. Program Pemberdayaan Desa tersebut salah satunya adalah Program Kewirausahaan yang berkaitan dengan Budidaya ternak jangkrik. Budidaya ternak jangkrik telah sangat membantu dalam pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19(Kemendes-PDPT:2022).

Budidaya ternak jangkrik ini berlokasi di RT 01 RW 01 Dusun 03 Desa Ngabar. Dari sisi pengambilan kebijakan Pemerintah Desa Ngabar bersama Badan Permusyawaratan Desa Ngabar dengan melibatkan masyarakat mengadakan musyawarah untuk menjangkir dan menyaring aspirasi dan usulan. Dari beberapa usulan yang sangat unik dan menarik untuk dikembangkan yakni budidaya ternak jangkrik sebagai sub sistem ekonomi yang menyokong ekonomi. Program ini diketuai oleh Pak Darmo. Selain dalam pemeliharaan, jangkrik termasuk serangga yang ramai peminat, karena sebagai salah satu komoditas pakan burung kicau yang sedang digemari masyarakat. Lalu, usulan masyarakat ini dibahas dalam musyawarah lingkungan dan berlanjut ke tahap musyawarah dusun yang menghasilkan hasil musyawarah dusun lalu ke musyawarah desa dan akhirnya ditetapkan sebagai skala prioritas usulan desa sekaligus masuk dalam Rencana Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Selepas tahap-tahap di atas, masuklah pada tahap realisasi anggaran yang diawali dengan pelatihan bagi calon pengelola. Selanjutnya berlanjut ke tahap pelaksanaan dengan mempersiapkan seluruh kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Masa pemeliharaan jangkrik dari bibit sampai dengan siap panen adalah dua bulan. Setelah dua bulan pemeliharaan, maka jangkrik hasil budidaya siap untuk dipanen. Tujuan dari program kewirausahaan ini adalah untuk mengangkat ekonomi masyarakat sebagai tambahan pendapatan di tengah masa pandemi. Juga menjadi inovasi desa dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mampu dan tercukupi semua kebutuhan. Selanjutnya dapat mengurangi angka pengangguran dari dampak pandemi Covid-19 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

Dari alasan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lapangan yang berjudul "Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan

akibat Covid-19 (Studi Kasus Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”.

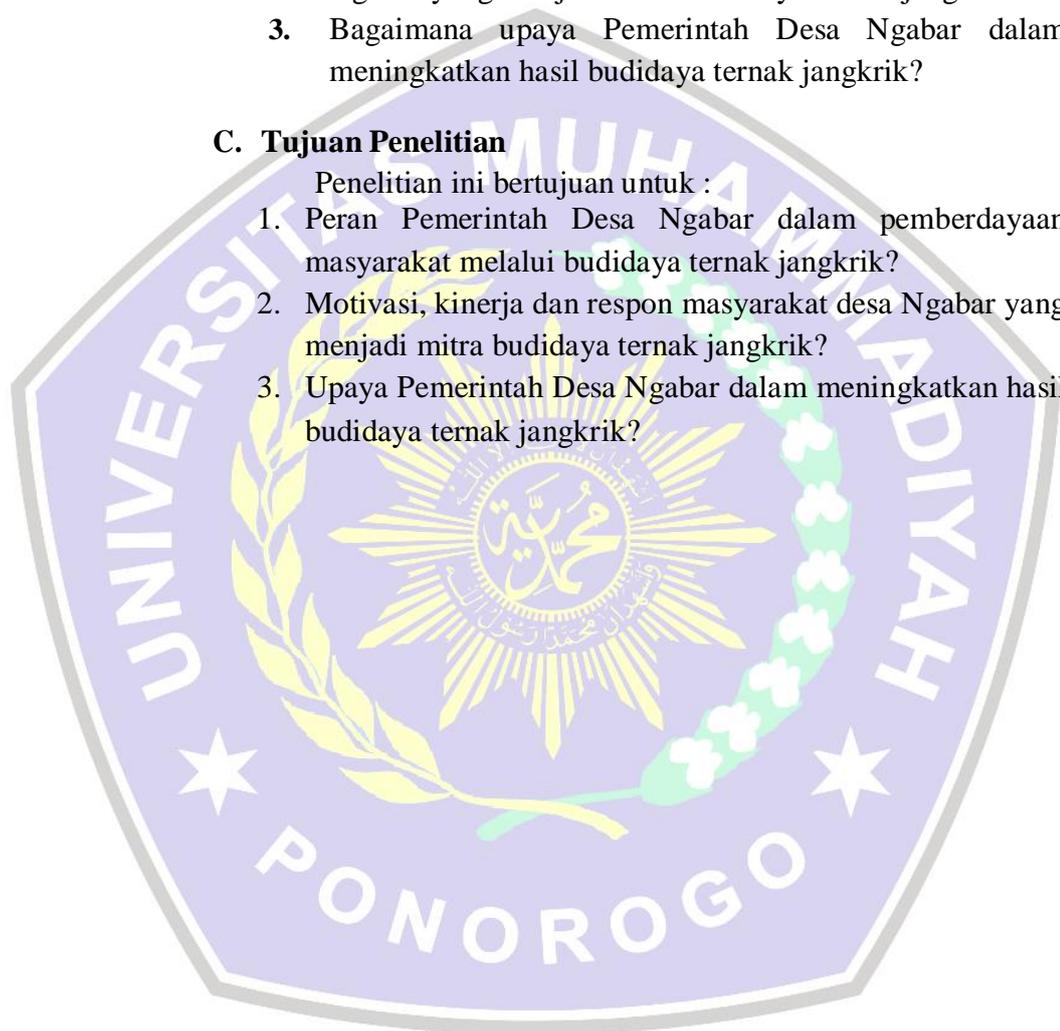
B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa Ngabar dalam pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ternak jangkrik?
2. Bagaimana motivasi, kinerja dan respon masyarakat desa Ngabar yang menjadi mitra budidaya ternak jangkrik?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Desa Ngabar dalam meningkatkan hasil budidaya ternak jangkrik?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Peran Pemerintah Desa Ngabar dalam pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ternak jangkrik?
2. Motivasi, kinerja dan respon masyarakat desa Ngabar yang menjadi mitra budidaya ternak jangkrik?
3. Upaya Pemerintah Desa Ngabar dalam meningkatkan hasil budidaya ternak jangkrik?



D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat :

1. Menjadi sumber inspirasi, informasi dan pedoman bagi pengambil kebijakan serta peneliti lainnya yang berminat dibidang ini:
2. Memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai strategi program pembangunan desa dalam pengentasan kemiskinan.
3. Dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus rujukan Pemerintah Desa terutama dalam Pengentasan Kemiskin Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.
4. Menjadi bahan informasi untuk dipertimbangkan oleh pemerintah Desa dalam pengambilan kebijakan.
5. Menambah referensi tentang pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (wilayah) untuk dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan penelitian selanjutnya.
6. Menjadi sebuah karya yang melengkapi pengetahuan dan wawasan yang ada di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

BAB II PEMBAHASAN

A. Definisi Konsep

1. Pengertian Desa

Desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah kecamatan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian zona administratif di bawah kecamatan dalam pemerintahan Kabupaten atau Kota madya, yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Peratin.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

3. Pandemi Covid-19

Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Jadi Pandemi Covid-19 adalah sebuah istilah untuk menyebut gejala Covid-19 telah menyerang banyak orang secara global.

4. Budidaya Ternak Jangkrik

Ternak jangkrik adalah proses perkembangbiakan jangkrik dalam jumlah yang banyak untuk tujuan bisnis pakan hewan peliharaan seperti burung, ikan, dan reptil. Ternak jangkrik

juga dapat dilakukan dalam skala kecil, biasanya sebagai hobi atau dijadikan hewan aduan.

B. Landasan Teori

Dalam sub bab ini penulis kemukakan Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Para Ahli Ilustrasi Sosiologi. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan tertentu yang mengalami kemiskinan dan keterbelakangan. Konsep pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang ada di suatu kelompok atau masyarakat. Dalam kajian sosiologi dan ilmu sosial, upaya tersebut lantas dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat. Mengutip buku Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan, yang ditulis Eko Sudarmanto dkk (2020:21), pengertian pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan warga tertentu yang ada di dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya tersebut dimaksudkan guna membangun kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran mereka, serta mengembangkan potensinya. Sementara dikutip dari penjelasan di buku Pengembangan Masyarakat karya Zubaedi (2013:162), konsep pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat.

Konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial pada kelompok masyarakat, untuk menjadikan mereka lebih produktif dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang produktif. Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat juga termasuk konsep pembangunan ekonomi yang berisi nilai-nilai sosial. Konsep tersebut mencerminkan cara pembangunan yang bersifat *people-centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Maksud konsep *peoplecentered* adalah pembangunan yang berorientasi pada masyarakat. Adapun konsep *participatory* berarti pembangunan yang melibatkan partisipasi warga. Sedangkan *empowering* dan *sustainable* merujuk pada strategi pembangunan yang berorientasi ke pemberdayaan masyarakat (komunitas) dan sifatnya berkelanjutan.

Teori Pemberdayaan Masyarakat Menurut Para Ahli Selama ini berkembang sejumlah teori pemberdayaan masyarakat. Namun, setidaknya terdapat dua teori pemberdayaan masyarakat menurut ahli ilmu sosial yang penting untuk dicermati. Selain itu, ada juga enam teori yang terkait dengan landasan konsep pemberdayaan masyarakat.

1). Teori Pemberdayaan Masyarakat menurut Jim Ife

Dalam bukunya yang berjudul *Community Development, Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and Practice* (1997), Jim Ife menjelaskan bahwa definisi pemberdayaan ialah memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan berpartisipasi pada upaya mempengaruhi kehidupan dari kelompoknya. Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan dua konsep pokok yakni: konsep power (daya) dan konsep *disadvantaged* (ketimpangan). Maka, pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan menggunakan 4 perspektif: pluralis, elitis, strukturalis, dan post-strukturalis.

Dalam buku *Pengembangan Masyarakat* karya Zubaedi (2013: 21-22), penjelasan dari empat perspektif itu masing-masing adalah sebagai berikut. Pertama, perspektif pluralis melihat pemberdayaan sebagai proses buat menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Dalam perspektif pluralis, pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Jadi, pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah. Kedua, perspektif elitis memandang pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi kalangan elite, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka, atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang kuat dari para elite. Ketiga, perspektif strukturalis memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan yang harus dibarengi oleh perubahan struktural secara fundamental serta hilangnya penindasan struktural. Keempat, perspektif Post-strukturalis menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis.

Jadi, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Titik tekan pemberdayaan pada aspek

pendidikan kepada masyarakat. Jim Ife juga mengidentifikasi 6 jenis kekuatan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan mereka. Keenam kekuatan itu adalah: kemampuan menentukan pilihan pribadi; kemampuan menentukan kebutuhan sendiri; kebebasan berekspresi; kemampuan kelembagaan; akses pada sumber daya ekonomi; dan kebebasan dalam proses reproduksi. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan masyarakat dan ketimpangan yang membuat mereka terbelakang, terdapat tiga strategi pemberdayaan yang bisa dilakukan. Ketiga strategi itu adalah: *Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.* Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka.

2). Pemberdayaan Masyarakat Menurut Teori Actors

Salah satu perspektif yang kerap dipakai dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah teori Actors. Dikutip dari artikel "Teori Actors dalam Pemberdayaan Masyarakat" oleh Karjuni Dt. Maani, dalam Jurnal Demokrasi (Vol X, No 1, 2011), teori actors dikemukakan Sarah Cook dan Steve Macaulay, dalam *Perfect Empowerment* (1996). Dalam teori Actors, masyarakat dinilai sebagai subyek yang mampu melakukan perubahan apabila terlepas dari kendali yang kaku dan mendapatkan kebebasan untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan, dan tindakan mereka. Cara pandang itu sesuai akronim Actors, yakni authority (wewenang); *confidence and competence* (percaya diri dan kompetensi); trust (kepercayaan); opportunities (kesempatan); responsibilities (tanggung jawab); dan support (dukungan). Teori Actors mengarah pada pendelegasian secara sosial dan moral sejumlah aspek berikut: Mendorong ketabahan Mendelegasikan wewenang sosial Mengatur kinerja Mengembangkan organisasi Menawarkan kerja sama Berkomunikasi secara efisien Mendorong inovasi Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Teori yang ditawarkan Cook dan Macaulay menghasilkan perubahan yang terencana karena input yang digunakan sudah diantisipasi sejak dini. Oleh karena itu, output yang dihasilkan berdayaguna secara optimal. Dalam kerangka kerja teori Actors, pemberdayaan dilakukan dengan menumbuhkan keberdayaan

masyarakat yang didukung aspek internal dan eksternal. Sementara aktor dalam pemberdayaan adalah pemerintah atau organisasi non-pemerintah. 3. Enam Teori Terkait Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dua teori di atas merumuskan model pemberdayaan masyarakat yang bisa diimplementasikan dan memuat sejumlah konsep teknis. Di luar itu, terdapat pula enam teori dalam bentuk luas yang terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat karena menjelaskan pola-pola interaksi sosial. Mengutip buku modul sosiologi terbitan Kemdikbud berjudul Kenali Dirimu (2020: 6-7), berikut ini keenam teori tersebut: Teori Ketergantungan Kekuasaan (power-dependency) Teori Sistem (The Social System) Teori Ekologi (Kelangsungan Organisasi) Teori Konflik Teori Mobilisasi Sumberdaya Teori Konstruktivisme.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Menurut Sugiyono (2016:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dilihat dari jenisnya (menurut tempat dilaksanakannya penelitian), penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan dikerjakan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian berkenaan dengan Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam budidaya ternak jangkrik di Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Siman, Desa Ngabar.

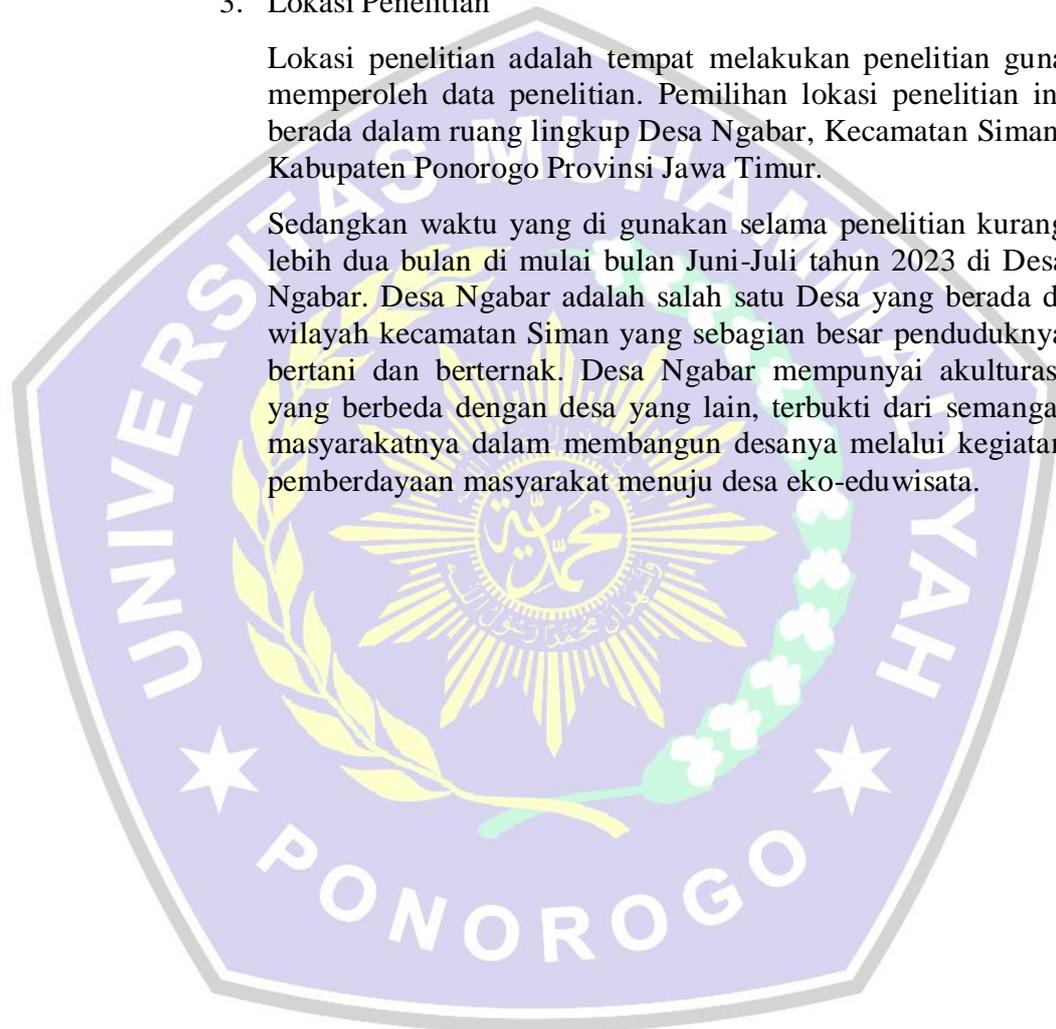
2. Fokus penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini, untuk menganalisis “Peranan Program Pemberdayaan Masyarakat pada budidaya ternak jangkrik dalam kerangka penanggulangan dampak Covid-19 di Desa Ngabar, kecamatan Siman, kabupataan Ponorogo

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini berada dalam ruang lingkup Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan waktu yang di gunakan selama penelitian kurang lebih dua bulan di mulai bulan Juni-Juli tahun 2023 di Desa Ngabar. Desa Ngabar adalah salah satu Desa yang berada di wilayah kecamatan Siman yang sebagian besar penduduknya bertani dan berternak. Desa Ngabar mempunyai akulturasi yang berbeda dengan desa yang lain, terbukti dari semangat masyarakatnya dalam membangun desanya melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat menuju desa eko-eduwisata.



BAB III DESKRIPSI

A. Deskripsi Poster Lengkap

Pada tahun 2021 di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ada beberapa inovasi kewirausahaan yang bersumber dari dana Desa khususnya Program Pemberdayaan Desa. Salah satunya Program Kewirausahaan yang berkaitan dengan Budidaya ternak jangkrik yang sangat membantu dalam pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

Di Desa Ngabar RT 01 RW 01 Dusun 03, Pemerintah Desa bersama Masyarakat mengadakan musyawarah dalam menyaring aspirasi dan usulan. Dari beberapa usulan yang sangat unik dan menarik untuk dikembangkan yakni Budidaya ternak jangkrik. Program ini diketuai oleh Pak Darmo. Selain dalam pemeliharaan, jangkrik termasuk serangga yang ramai peminat. Lalu, usulan masyarakat ini di bahas dalam musyawarah lingkungan dan berlanjut ke tahap musyawarah dusun yang menghasilkan hasil musyawarah dusun lalu ke musyawarah desa dan akhirnya ditetapkan sebagai skala prioritas usulan desa sekaligus masuk dalam Rencana Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Selepas tahap-tahap diatas, masuklah pada tahap realisasi anggaran yang diawali dengan pelatihan bagi calon pengelola. Selanjutnya berlanjut ke tahap pelaksanaan dengan mempersiapkan seluruh kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Masa pemeliharaan jangkrik dari bibit sampai dengan siap panen adalah dua bulan. Setelah dua bulan pemeliharaan, maka jangkrik hasil budidaya siap dipanen.

B. Model



C. Hasil HKI

PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA NGABAR DALAM BUDIDAYA TERNAK JANGKRIK TAHUN 2021

PENDAHULUAN

Pada tahun 2021, Budidaya Ternak Jangkrik meingkatkan pendapatan sebagian masyarakat desa Ngabar. Pemerintah Desa memerlukan model Program Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui inovasi kewirausahaan untuk meningkatkan pendapatan per kapita keluarga masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa sering terkendala. Teori dan model pemberdayaan masyarakat sangat krusial saat ini. Untuk itu, teori dan model pemberdayaan masyarakat dipelajari dalam literatur untuk meneropong fenomena yang mengemuka. Studi kasus deskriptif (descriptive case study) diterapkan dalam studi ini. Fokus studi ini pada masyarakat desa Ngabar dan pemerintahannya sebagai pemangku kepentingan pemberdayaan desa. Studi kasus ini diawali dengan identifikasi masalah, pembuatan desain dan instrumen, pengumpulan data, analisis, dan penulisan laporan. Kajian ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pemberdayaan masyarakat di desa Ngabar berdasarkan pemahaman dan perilaku manusia menurut opini pelakunya.

ANALISA SITUASI

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa harus menjadi rujukan pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya. Meskipun demikian, pemerintah desa pada umumnya masih menghadapi kesulitan untuk menemukan dan merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakatnya. Terlebih lagi masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa yang diduga berakibat pada rendahnya kemampuan inovasi berwirausaha. Maka, pemerintah desa dituntut untuk terlibat langsung untuk memainkan peran penting dan fungsinya sebagai katalisator, motivator dan inovator pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan berupa program beserta anggarannya. Untuk itu, Model Pemberdayaan Masyarakat Desa berupa program inovasi kewirausahaan menggunakan dana desa layak untuk dikaji agar dapat meningkatkan taraf pendapatan per kapita keluarga masyarakat desa setempat sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

PERMASALAHAN YANG DI HADAPI

Pemerintah Desa Ngabar memprioritaskan budidaya ternak jangkrik untuk pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, Pemerintah Desa Ngabar membuat anggaran pemberdayaan masyarakat. Budidaya jangkrik teridentifikasi sebagai proyek pemberdayaan berbasis inovasi kewirausahaan yang didanai Dana Desa oleh Pemerintah Desa Ngabar. Konsep pemberdayaan masyarakat Desa Ngabar dalam Budidaya Jangkrik hingga tahun 2021 memerlukan analisis teori berdasarkan fenomena lapangan melalui studi kasus. Model pemberdayaan masyarakat ini dapat membantu pemerintah desa untuk membuat kebijakan pemberdayaan masyarakat. Konsep dan model pemberdayaan masyarakat ini juga dapat membantu daerah pedesaan lainnya menemukan inovasi kewirausahaan untuk meningkatkan pendapatan per kapita keluarga berpenghasilan rendah.



Pembuat :

- Marikun
- Drs. Bambang Triono, M.Si
- Khoirurosyidin, M.Si
- Dr. Dian Suluh Kusumawati Dewi, M.AP

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemerintah Desa sebagai roda pemerintahan terbawah selalu berupaya untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui dana desa yang khususnya bisa diberikan kepada masyarakat melalui program-program pemberdayaan yang bisa mengangkat dan menanggulangi kemiskinan dan yang bisa menambah pendapatan perkapita masyarakat melalui inovasi kewirausahaan budidaya ternak jangkrik di desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo.

B. Kritik dan Saran

Kelompok-kelompok masyarakat penerima program yang bersumber dari dana desa pemerintah harus bisa melaksanakan sebaik mungkin dalam memanfaatkan bantuan agar pemerintah bisa menambah dana untuk program-program yang bisa mengangkat kemiskinan yang ada di Desa khususnya dan kemiskinan yang ada di Indonesia dan selanjutnya desa lah yang langsung dan paling dekat dengan masyarakat.



A. FOTO MUSYAWARAH DESA



B. FOTO/GAMBAR BUDIDAYA JANGKRIK

